



LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan
Volume 10, Nomor 2, Desember 2022: 331-362
ISSN 2355-0341; E-ISSN 2477-5320
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/libraria>
<http://dx.doi.org/10.21043/libraria.v10i2.11296>

Struktur dan Sistem dalam Peningkatan Inklusi Sosial Ekonomi melalui Pengembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Magelang

Structure and Sistem in Increasing Sosial Economic Inclusion Through the Development of Library Services in Magelang District

Moch Lukluil Maknun

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia
moch054@brin.go.id

Muhammad Khusnul Muna

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia
m.khusnulmuna@gmail.com

Andjar Prasetyo

Bappeda Kota Magelang
andjar.prasetyo@gmail.com

Milta Eliza

Perpustakaan Muda Bhakti, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah,
Indonesia
perpus.kt.mudabhakti@gmail.com

Abstract

The purpose of the study is to explore the form of socio-economic inclusion of libraries and to analyze the capacity of the library structure and sistem in Magelang Regency. The research method uses qualitative descriptive narration using primary data obtained in the data collection process while secondary data gained from library monographs. Data collection through surveys, interviews and data compilation was carried out in May-June 2021 with the study locus at the Young Bhakti Library, Ngablak Village, Srumbung District, Magelang Regency. The structure and sistem uses six parameters including organization, organizational policies and procedures, consultation and decision making, internal communication, accountability and transparency, office and its equipment. The six-parameter construction is built in a form of measurement that can describe the capacity of libraries in sosial and economic inclusion through structures and sistems. The study findings show that the Muda Bhakti Library is able to encourage socio-economic inclusion by measuring the structure and sistem which is divided into six parameters that have reached the stage of development. The form of measuring the structure and system in this study can be scientific literature and policy towards public services.

Keywords: *Socio-Economic Inclusion, Structure and System, Libraries.*

Abstrak

Kajian ini bertujuan menggali bentuk inklusi sosial ekonomi perpustakaan di Kabupaten Magelang dan menganalisis kapasitas struktur dan sistem perpustakaan di Kabupaten Magelang. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan menarasikan secara deskriptif terhadap data primer yang diperoleh dalam proses pengumpulan data sedangkan data sekunder berasal dari monografi perpustakaan. Pengumpulan data melalui survei, wawancara dan penyusunan data dilakukan pada bulan Mei-Juni 2021 dengan lokus kajian di Perpustakaan Muda Bhakti Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Stuktur dan sistem menggunakan enam parameter meliputi Organisasi, Kebijakan dan prosedur organisasi, Konsultasi dan pengambilan keputusan, Komunikasi

internal, Akuntabilitas dan transparansi, Kantor dan perlengkapannya. Konstruksi enam parameter dibangun dengan bentuk pengukuran yang dapat mendeskripsikan kapasitas perpustakaan dalam inklusi sosial dan ekonomi melalui struktur dan sistem. Temuan kajian menunjukkan Perpustakaan Muda Bhakti mampu mendorong inklusi sosial ekonomi dengan pengukuran stuktur dan sistem yang terbagi dalam enam parameter yang telah mencapai tahap berkembang. Bentuk pengukuran stuktur dan sistem dalam kajian ini dapat menjadi literasi ilmiah dan kebijakan terhadap layanan masyarakat.

Kata kunci: Inklusi Sosial Ekonomi, Struktur dan sistem, Perpustakaan

A. Pendahuluan

Perpustakaan selayaknya menyediakan layanan untuk siapapun tanpa memandang orang berdasarkan kepentingan sosial maupun ekonomi sehingga memiliki sifat yang tidak diskriminatif dalam memberikan layanan yang baik dan harus memiliki peran yang adil bagi setiap pemustaka. Salah satu jenis perpustakaan yang tergolong perpustakaan umum adalah perpustakaan desa yang bisa jadi diklaim tertinggal karena penggunaanya dianggap tertinggal oleh kecanggihan teknologi informasi yang ada. Meskipun demikian, tetap saja perpustakaan desa ini memiliki kewajiban untuk memberikan layanan informasi yang inklusif, yang tidak membeda-bedakan siapapun dari atribut yang melekat pada dirinya seperti usia, suku, jenis kelamin, agama, kebangsaan, bahasa, dan status sosial. Perpustakaan desa menjadi wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Salah satu kriteria orang yang terekskusi adalah mereka yang tidak memiliki akses ke perpustakaan karena berbagai sebab, salah satunya adalah tidak

memiliki waktu atau kesempatan ke perpustakaan karena jarak dan kesibukan sehingga mereka menjadi golongan yang tereksklusi¹.

Di satu sisi perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting dalam proses pengetahuan dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*). Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan melalui pengembangan perpustakaan yang lebih mengutamakan program pemberdayaan masyarakat, yang dengan adanya program ini perpustakaan khususnya perpustakaan desa juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan berbagai program pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan².

¹ Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006); Elva Rahmah, *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018); H Haryanto, "Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan Dan Entrepreneur Corner," *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)* (ipi.web.id, 2020), <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/49>.

² Haryanto, "Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan Dan Entrepreneur Corner"; R A Rachman dan D Sugiana, "Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar ...," *Seminar Nasional MACOM ...* (researchgate.net, 2019), https://www.researchgate.net/profile/Rani_Rachman3/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang/links/5e365dad458515072d; D Utami dan W D Prasetyo, "Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat," ... *Informasi Antar Perpustakaan*, 2019, <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/view/74>; D F Ningrum, "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMA N 1 Jetis Bantul," *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 2020, <https://journal.uui.ac.id/unilib/article/view/14279>; Wika Fitriana, *Promosi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas*

Dengan adanya hal tersebut perlu diterapkan layanan kepada pengguna perpustakaan desa tanpa marjinalisasi. Selain itu, juga perlu diketahui bahwa layanan yang ditawarkan perpustakaan harus siap dan dapat diakses oleh semua yang membutuhkan serta merangkul kalangan seluas mungkin. Tujuan dari adanya pelayanan ini adalah agar masyarakat desa lebih mudah mengakses informasi dan tidak perlu datang ke perpustakaan yang ada di kota, dimana koleksi, layanan dan kegiatan yang disediakan disesuaikan dengan pemustaka yang ada disekitar desa tersebut. Layanan yang ada harus mengikuti perkembangan zaman, seperti menerapkan teknologi informasi yang ada, dimana masyarakat dapat mengakses bahan pustaka secara online sehingga lebih mudah dan efisien untuk meningkatkan literasi masyarakat. Literasi mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peranan penting dalam hal itu. Literasi merupakan hak setiap warga negara yang didapat melalui pendidikan sekolah maupun program *adult literacy* (literasi untuk orang dewasa)³.

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar (repo.iain-tulungagung.ac.id, 2021), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/19471>; Woro Titi Haryanti, "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 2 (2019), doi:10.32734/lwsa.v2i2.728.

³ S Agustina, "Perpustakaan Sebagai Wahana Terapi yang Ramah Disabilitas: Implementasi Biblioterapi di Perpustakaan Lingkungan pendidikan," *EduLib*, 2014, <https://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/article/view/1137>; Rahmah, *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*; Ralph Catts dan Jesus Lau, "Towards Information Literacy Indicators: Conceptual framework paper," *Information for All Programme (IFAP)*, UNESCO, 2008; Herawati Sri Septina dan Abdul Karim Halim, "Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat Sebagai Sarana Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19 di Perumahan Bukit Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor," *PKM-P*, 2020, doi:10.32832/pkm-p.v4i2.743.pada prinsipnya biblioterapi bisa ...,"author":{"dropping-particle":"","family":"Agustina","given":"S","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"EduLib","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":["2014"]},"note":"Cited By (since 2014

Program literasi mampu menghasilkan manfaat yang melampaui hasil dari pendidikan di sekolah. UNESCO di tahun 2016 menyatakan Program Literasi bagi Orang Dewasa muncul untuk menghasilkan beberapa manfaat, khususnya membangun *selfesteem* (kepercayaan diri) dan *empowerment* (pemberdayaan) dengan mekanisme pembiayaan yang sama efektifnya dengan pendidikan utama di sekolah. Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat menyediakan informasi dan fasilitas belajar yang berperan penting mendorong peningkatan literasi masyarakat. Kegiatan literasi dan penyediaan informasi, baik cetak maupun online berandil besar menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi sehingga mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Data tes internasional menunjukkan lebih dari 55% orang Indonesia yang menyelesaikan pendidikan masih mengalami *functionally illiterate*. *Functionally illiterate* diartikan kurangnya kemampuan membaca dan menulis untuk mengelola kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya yang membutuhkan kemampuan membaca yang melebihi tingkatan dasar⁴.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa “Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan”. Hal ini menunjukkan bahwa

⁴ C P Siwi dan L Ruhaena, *Proses Stimulasi Literasi Anak Prasekolah Oleh Guru* (eprints.ums.ac.id, 2017), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/52646>; D N Inten, “Peran keluarga dalam menanamkan literasi dini pada anak,” *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2017, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/golden_age/article/view/2689; Kemendikbud, “KNIU Gelar Sosialisasi UNESCO GNLC dan UNESCO WBCC,” <https://gln.kemdikbud.go.id/>, 2021, <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/kniu-gelar-sosialisasi-unesco-gnlc-dan-unesco-wbcc/>; Evita Devega, “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos,” *kominfo.go.id*, 2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media.

Perpustakaan mengemban amanah sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan yang dikelola secara profesional dan terbuka bagi kalangan sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan dapat diukur capaian kinerjanya bagi kesejahteraan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan kata kunci dalam pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi, lebih dari itu perpustakaan dapat bertransformasi menjadi tempat dalam pengembangan diri masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Latar belakang itu yang melandasi Perpustakaan Nasional sebagai pembina semua jenis perpustakaan dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melakukan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan kesenjangan akses informasi. Paradigma perpustakaan harus diubah yang semula dianggap sebagai gudang buku kini bertransformasi menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Perpustakaan harus bisa bertransformasi sehingga memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik menuju kesejahteraan. Perpustakaan selain menyediakan

sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada membaiknya kualitas layanan perpustakaan dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat yang secara otomatis, meningkatkan literasi masyarakat⁵.

Di era tatanan normal baru (*new normal*), perpustakaan berperan melakukan penguatan literasi sehingga berdampak pada pemulihan sosial-ekonomi. Perpustakaan telah menjadi ruang publik untuk berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual, dan melatih kecakapan keterampilan. Peran literasi demi mewujudkan masyarakat sejahtera sudah dilakukan perpustakaan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bertujuan memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi meningkat yang berujung peningkatan kreativitas masyarakat dan menipiskan kesenjangan akses informasi.

Bentuk inklusi baik sosial maupun ekonomi dalam konteks ilmiah memiliki manfaat yang positif. Perhatian ilmiah terhadap inklusi juga muncul dalam beberapa kajian seperti Warsilah yang membahas Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi

⁵ H S Adhi, "Peran Pustakawan dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Melalui Program Proliterasiku," *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)* (ipi.web.id, 2018), <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/64>; K Khairunisa dan W Dastina, "Strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat ...," *... Ilmu Perpustakaan ...*, 2020, http://baitululum.fah.uinjambi.ac.id/index.php/b_ulum/article/view/65; Rachman dan Sugiana, "Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar"

Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah⁶; Prasetyawan dan Suharso bahkan sejalan dengan fokus kajian ini dengan membedah Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa⁷; Raharja dan Nursalim melakukan kajian berkaitan dengan perpustakaan melalui Pemberdayaan Masyarakat Suku Kokoda dalam Membangun Rumah Baca Berbasis Inklusi Sosial⁸; dan kajian Mahdi menguatkan inklusi terhadap perpustakaan dengan kajian Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial⁹.

Inklusi dalam bidang ekonomi dapat dibaca pada kajian dari Nasution dan Astuti¹⁰, yang secara makro menunjukkan inklusi dengan Kajian Inklusi Sosial dan Keuangan serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia; kemudian kajian Jannah dan Kaluge¹¹ yang relevan dengan konsep inklusi ekonomi dengan kajian Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Inklusi Keuangan Negara Asia Tahun 2010-2015; kajian Adriani dan Wiksuana¹² melengkapi dengan Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali; kajian Gutama dan Widiyahseno¹³ dengan kajian Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa; kemudian kajian yang menggunakan

⁶ Henny Warsilah, "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 207-32.

⁷ Yanuar Yoga Prasetyawan dan Patut Suharso, "Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa," *Acarya Pustaka* 1, no. 1 (2015): 31-40.

⁸ Surya Putra Raharja dan Nursalim, "Pemberdayaan Masyarakat Suku Kokoda Dalam Membangun Rumah Baca Berbasis Inklusi Sosial," *Abdimasa* 1, no. 1 (2018): 15-19.

⁹ Reza dan Andi Asari Mahdi, "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial," *Jurnal PKS* 19, no. 3 (2020): 255-63.

¹⁰ Nasution dan Astuti (2018)

¹¹ Jannah dan Kaluge (2020)

¹² Adriani dan Wiksuana (2018)

¹³ Gutama dan Widiyahseno (2020)

pendekatan monev dapat dilihat pada kajian Widodo¹⁴ Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta.

Pada bidang Pendidikan muncul literasi ilmiah tentang inklusi oleh Dian¹⁵, dengan kajian Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMA N 1 Jetis Bantul juga kajian Woro¹⁶ yang fokus pada Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Berbagai kajian sebelumnya yang mengaitkan perpustakaan dan literasi tersebut memberikan perhatian terhadap inklusi yang mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Adapun lokus kajian ini ingin menyatakan bahwa dalam pengembangan perpustakaan diperlukan struktur dan sistem yang jelas dan dapat direplikasi sehingga mampu memberikan hasil yang jelas dan bermanfaat. Unsur struktur dan sistem memiliki peranan penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan perpustakaan. Salah satu obyek perpustakaan berbasis inklusi yang layak diangkat karena berbagai prestasi dan sejarahnya adalah Perpustakaan Muda Bhakti di Kabupaten Magelang.

Berangkat dari tujuan ini, kajian ini membatasi kajian dengan rumusan masalah: “Bagaimana bentuk inklusi sosial ekonomi perpustakaan di Kabupaten Magelang dan bagaimana kapasitas struktur dan sistem perpustakaan di Kabupaten Magelang”. Tujuan kajian adalah menggali bentuk inklusi sosial ekonomi perpustakaan di Kabupaten Magelang dan menganalisis kapasitas struktur dan sistem perpustakaan di Kabupaten Magelang.

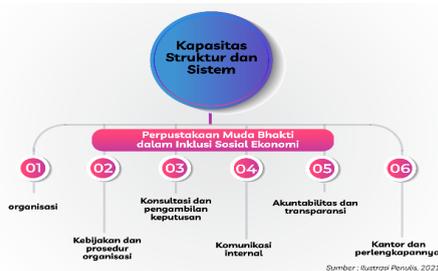
¹⁴ Widodo (2020)

¹⁵ Dian Fitri Ningrum (2019)

¹⁶ Woro Titi Haryanti (2019)

1. Metode

Kajian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan menarasikan data primer secara deskriptif yang diperoleh dalam proses pengumpulan data ditambah data sekunder yang berasal dari monografi perpustakaan. Pertimbangan eksploratif didasarkan pada fokus kajian yang berusaha menggali informasi di lokus kajian. Merujuk pada Edmonds dan Kennedy¹⁷ yang menyebutkan bahwa secara umum, tujuan metode kualitatif adalah untuk mengungkapkan dan memahami fenomena dalam konteks tertentu, tanpa berusaha menyimpulkan jenis sebab akibat apa pun. Ini sangat berbeda dari sifat penelitian eksperimental, yang dirancang untuk menyimpulkan sebab dan akibat. Pengumpulan data melalui survei, wawancara dan penyusunan data dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2021 dengan lokus kajian di Perpustakaan Muda Bhakti Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Stuktur dan sistem menggunakan enam parameter meliputi: Organisasi, Kebijakan dan prosedur organisasi, Konsultasi dan pengambilan keputusan, Komunikasi internal, Akuntabilitas dan transparansi, serta Kantor dan perlengkapannya. Analisis kapasitas Stuktur dan sistem terhadap inklusi sosial ekonomi yang dilakukan secara ringkas dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



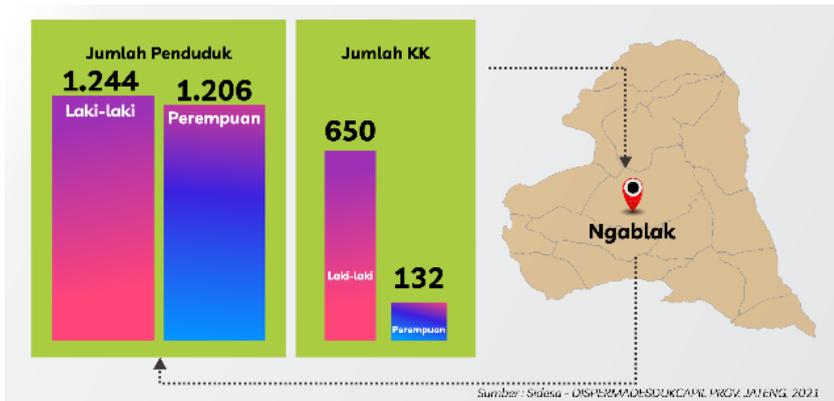
Gambar 1. Kontruksi Kapasitas Stuktur dan sistem

¹⁷ Edmonds, W dan D. Kennedy (2017)

Konstruksi enam parameter dibangun dengan bentuk pengukuran yang dapat mendeskripsikan kapasitas perpustakaan dalam inklusi sosial dan ekonomi melalui struktur dan sistem.

B. Pembahasan

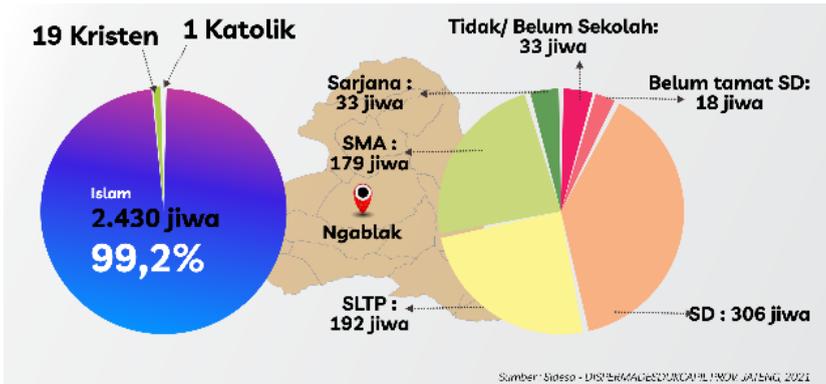
Perpustakaan Muda Bhakti (Permubha) berada di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dengan lokasi di kaki Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Potret demografi Desa Ngablak menurut data dari Sidesa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 memiliki total penduduk berjumlah 2.450 jiwa dan memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 782 dengan distribusi masing-masing menurut jenis kelamin seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Distribusi Penduduk dan KK Desa Ngablak Srumbung Tahun 2020

Jumlah penduduk tersebut 99,2 % beragama Islam sedangkan sisanya Kristen dan Katolik. Pendidikan tidak/belum sekolah sebanyak 4,3%, belum tamat SD sebanyak 2,4%, sedangkan lulusan sekolah dasar sebanyak 40,2%, kemudian dari lulusan SLTP sebanyak

25,2%, SMA sebanyak 23,5%, dan sisanya adalah Sarjana mulai DI sampai dengan S1. Distribusi jumlah penduduk menurut agama dan Pendidikan di Desa Ngablak seperti pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Distribusi Penduduk menurut Agama dan Pendidikan Desa Ngablak Srumbung Tahun 2020

Demografi tersebut menunjukkan adanya kapasitas penduduk yang membutuhkan literasi untuk meningkatkan pendapatannya, baik dalam cakupan agama maupun Pendidikan. Upaya yang dilakukan desa dengan membangun perpustakaan merupakan langkah positif dan nyata, meskipun memerlukan pemahaman yang tidak mudah dalam proses implementasinya.

Permubha (gambar 4) selama ini telah menjadi lokus penelitian, umumnya dari kampus baik oleh mahasiswa maupun dosen, tetapi data hasil penelitian belum ada yang disampaikan ke Permubha. Kondisi ini merupakan potret ilmiah yang memerlukan perhatian terkait etika penelitian. Di sisi lain karena ketidakteraturan peneliti dalam melakukan serah simpan berdampak pada dokumentasi administrasi penelitian belum dapat disimpan dengan rapi, meskipun apabila dirunut dari buku kunjungan dapat diketahui siapa, dari mana, termasuk judul penelitiannya.

Permubha dalam penyampaian informasi memiliki website yang aktif, dengan agenda/program yang sedang berjalan saat ini adalah melayani sekolah *online* terutama untuk siswa SD dan MI setempat secara bergilir. Dari sisi ini, kegiatan atau bahkan kunjungan perpustakaan meskipun *online* cenderung naik dibanding sebelum pandemic Covid-19. Pengunjung dan peminjam tidak hanya dari warga lokal desa Ngablak atau kecamatan Srumbung, tetapi juga dari luar daerah. Jam buka pelayanan setiap hari Senin-Sabtu, pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Katalog masih manual disertai kartu indeks. Proses komputerisasi katalog pernah diawali, kemudian terjadi gangguan teknis peralatan komputer, data tidak terselamatkan. Saat ini sedang mulai disusun kembali komputerisasi katalog, seiring dengan program akreditasi perpustakaan yang dikoordinir oleh Dinas Perpustakaan Kab. Magelang (wawancara dengan Milta E, 16 Juni 2021).

Cikal bakal Permubha ini awalnya dari Karang Taruna yang di bawahnya memiliki unit-unit, dan salah satunya ada unit perpustakaan desa. Pada tahun 1985 Karang Taruna Desa Ngablak pernah menjadi teladan hingga tahun 1995 tetap bisa beroperasi. Gedung karang taruna merupakan hasil swadaya masyarakat dan seksi perpustakaannya aktif, banyak anak berkumpul di sini karena letaknya yang strategis. Gedung karang taruna yang awal hanya seluas 3x6 meter. Di masa awal, koleksi sangat minim, maka koleksi buku dan majalah Bapak Muhadi, penggagas perpustakaan desa diarahkan ke Permubha, bahkan hingga saat ini, majalah berlangganan Bapak Muhadi seperti Joko Lodhang masih disimpan di Permubha yang diharapkan dapat menarik pembaca dari golongan dewasa pula. Dari sini pula, pada saat dikunjungi mahasiswa KKN, maka salah satu program yang dijalankan adalah menyusun proposal pengadaan buku. Pada saat Kabupaten Magelang mengadakan lomba perpustakaan, pihak kecamatan menunjuk Permubha untuk

mewakili, hingga menjadi juara I di tingkat Kabupaten. Kemudian juga mewakili di tingkat Provinsi meskipun belum menjadi juara saat itu (wawancara dengan Muhadi, 16 Juni 2021).

Sejak awal berdiri, baik masih menjadi bagian dari Karang Taruna, animo masyarakat cukup bagus. Saat itu, perpustakaan yang masih minim koleksi memiliki strategi untuk menata koleksi buku dengan dijejer hingga menampilkan halaman sampul, terutama majalah dan buku-buku bacaan anak. Meskipun minat masyarakat cukup baik, tetaplah belum sampai kepada membutuhkan bahan bacaan seperti kaum yang lebih 'melek baca' atau kaum akademisi, oleh karenanya *display* bacaan sangat penting (wawancara dengan Milta E dan Muhadi, 16 Juni 2021).



Gambar 4. Lokasi Permubha

Permubha pernah dilirik Bank Dunia, dan pada saat 2006 setelah bencana erupsi Merapi, mendapatkan bantuan dana 24

juta yang difungsikan untuk pengadaan rak buku yang lebih layak. Setelah erupsi, dan atap jebol di beberapa bagian, membuat sarana dan prasarana sebagian besar rusak. Setelah rak buku ada, maka diputuskan secara musyawarah, meminta donator buku 'bekas pakai' kepada tiap warga. Setelah antusias warga menyumbang buku tinggi, maka pemerintah desa berinisiatif untuk menganggarkan tersendiri dana desa untuk pengadaan buku. Pada tahun 2010 Permubha tidak luput dari erupsi Merapi lagi dan perpustakaan 'kandas' kembali. Akan tetapi, didukung semangat warga, dan juga pengalaman sebelumnya, pada 2013 perpustakaan dapat kembali bangkit. Perpustakaan pada masa bencana menjadi lokasi strategis berkumpul warga dan mencari informasi. Pada saat menjadi wilayah KRB 3 (Kawasan rawan bencana), maka segala informasi yang paling awal disengaja berada di perpustakaan. Informasi apapun terkait antisipasi bencana akan berpusat di sini. Oleh karena itu, bencana Merapi di satu sisi menjadi momentum menarik warga semakin mendekat dan memanfaatkan perpustakaan (wawancara dengan Muhadi, 16 Juni 2021).

Program yang dimiliki Permubha beragam, salah satunya adalah 'salak pustaka'. Penduduk Desa Ngablak 90%nya adalah petani salak, maka melalui musyawarah, tiap Kepala Keluarga yang memiliki kebun salak menghibahkan satu pohonnya untuk mendukung perpustakaan. Dapat dikatakan ini menjadi penyokong utama perpustakaan, di samping dana dari desa dan juga sebagian dana hasil 'bengkok' desa. Diharapkan nantinya Permubha menjadi perpustakaan mandiri. Hasil musrembang desa tahun 2016, membangun gedung karang taruna, yang akhirnya dapat dieksekusi pada tahun 2017. Dari situ kemudian dapat menjadi juara Kabupaten dan Propinsi, dan juara dua nasional. Di Desa Ngablak terdapat 3 lembaga pendidikan dasar, yaitu satu SD dan dua MI. Pada masa pandemi dibuatkan jadwal kunjungan bergilir sehingga grafik

kunjungan semakin meningkat. Hingga saat ini, sudah terbentuk forum anak perpustakaan. Setiap dusun dari tujuh dusun di desa Ngablak, sampling sebanyak tiga anak yang dapat aktif mengenalkan dan mengajak teman-teman ke perpustakaan.

Gedung Permubha terdiri dari dua lantai, lantai satu sebagai unit perpustakaan layanan baca dan peminjaman, sedangkan lantai dua berupa aula multi fungsi yang dilengkapi fasilitas untuk rapat warga maupun mengadakan berbagai kegiatan. Selain itu, di lantai dua disimpan peralatan kesenian warga dapat dilihat pada gambar 5.



Sumber : Hasil Survey, 2021

Gambar 5. Kondisi Eksisting Permubha dan diskusi Kapasitas Struktur dan Sistem

Aktivitas ekonomi yang disepakati dalam menjaga keberlangsungan Permubha dengan interaksi masyarakat yang menyepakati untuk setiap petani/kepala keluarga berkontribusi dari penjualan hasil panen salak yang merupakan tanaman yang terdapat di lokasi Permubha berada. Secara nominal minimal sebesar Rp 15.000,- untuk setiap kontribusi yang sifatnya tidak

mengikat. Mekanisme pengelolaan dilakukan oleh Bapak Muhadi dan kontribusi rutin dan jelas bersumber dari bengkak dari Desa Ngablak. Selain itu terdapat pula Gerbang Kuliner Salak (GKS). GKS saat ini memiliki 6 anggota yang telah beberapa kali sudah mewakili/mengikuti pelatihan pengembangan.

Deskripsi Permubha melalui pendekatan struktur dan sistem melalui enam parameter dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Parameter pertama adalah Bagan organisasi (Organogram) didefinisikan terdapat garis pelaporan yang jelas dalam Permubha. Hal ini sejalan dengan rencana strategis, ditinjau dan diperbarui secara berkala dan digunakan secara konsisten.
2. Kebijakan dan prosedur organisasi merupakan kebijakan dan prosedur organisasi yang jelas ada untuk semua area operasional yang relevan baik program, keuangan, pengadaan, sumber daya manusia dan teknologi informasi (TI). Staf telah dilatih dan mematuhi. Kebijakan dan prosedur organisasi ditinjau secara berkala.
3. Konsultasi dan pengambilan keputusan merupakan proses yang jelas dan terstruktur untuk konsultasi dan pengambilan keputusan yang dipahami dan dipatuhi. Staf dan penerima manfaat program/proyek dikonsultasikan mengenai isu-isu yang mempengaruhi mereka.
4. Komunikasi internal. Organisasi memiliki sistem yang dikembangkan dengan baik untuk komunikasi antara individu, unit dan program dan menggunakan berbagai alat komunikasi internal yang sesuai (rapat tatap muka; email, buletin, folder bersama, intranet, dan lain-lain).
5. Akuntabilitas dan transparansi. Organisasi memiliki proses yang sistematis dan transparan (misalnya forum komunitas,

pertemuan pemangku kepentingan, Rapat Umum Tahunan (RUPS), dan lain-lain) untuk menyebarluaskan keputusan dan hasil dengan jelas, sehingga staf, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahaminya.

6. Kantor dan perlengkapannya dideskripsikan sebagai organisasi memiliki kantor, ruang pertemuan dan penyimpanan yang cukup serta peralatan untuk menangani bisnisnya dan memelihara inventaris yang mutakhir.

Deskripsi aspek-aspek ini kemudian didistribusikan pada lima tahap yang ada untuk menentukan batas pencapaian yang setiap tahapnya dinarasikan pada setiap parameter. Batas inilah yang menunjukkan kapasitas struktur dan sistem Permubha, yang dibedakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah embriotik, tahap kedua adalah tumbuh, tahap ketiga adalah berkembang, tahap keempat adalah maju, dan tahap kelima adalah mandiri. Batasan dalam setiap tahap menunjukkan kondisi strata Permubha, semakin tinggi tahapnya maka akan semakin baik kapasitas struktur dan sistem Permubha, adapun indikator setiap tahap dapat dirinci sebagai berikut.

1. Tahap Pertama – Embriotik

Kapasitas struktur dan sistem tahap Embriotik ditandai dengan kondisi jika:

- a. Tidak ada organogram Permubha.
- b. Permubha tidak memiliki kebijakan dan prosedur Permubha, hanya pemimpin tertinggi yang membuat semua keputusan penting sendiri dan tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Para pengurus tidak terbuka terhadap ide-ide baru.
- c. Permubha tidak memiliki sistem komunikasi. Individu, unit dan program bekerja secara independen. Alat komunikasi internal tidak ada atau ada tetapi tidak digunakan.

- d. Tidak ada mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan atau hasil penting. Tidak ada rencana untuk mengubah situasi ini.
- e. Tidak ada kantor atau peralatan milik Permubha.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Permubha telah melewati kapasitas struktur dan sistem ini, hal ini dapat ditunjukkan dengan kondisi yang lebih dari indikator yang disyaratkan, organogram telah tersedia dengan baik, memiliki kebijakan dan prosedur; memiliki sistem komunikasi yang baik. Memiliki mekanisme dalam mengkomunikasikan sesuatu dan memiliki kantor atau peralatan.

2. Tahap Kedua – Tumbuh

Tahap tumbuh dalam kapasitas sistem dan struktur diukur dengan kondisi:

- a. Ada gagasan informal tentang organogram dalam Permubha, tetapi tidak ada yang disepakati secara formal.
Jalur pelaporan, wewenang dan akuntabilitas dipusatkan pada Ketua Permubha.
- b. Permubha telah memiliki kebijakan dan prosedur informal yang belum didokumentasikan. Permubha berbicara tentang pentingnya mendokumentasikan kebijakan dan prosedurnya dan berkomitmen untuk melakukannya di masa depan.
- c. Ada proses konsultasi informal oleh pimpinan untuk keputusan penting dengan beberapa rekan tepercaya, dan/ atau beberapa delegasi pengambilan keputusan penting. Namun, proses ini tidak sistematis dan terjadi atas kehendak para pemimpin puncak. Permubha memiliki sistem komunikasi internal informal.
- d. Ada komunikasi dan koordinasi minimal atau disfungsi antara individu, unit dan program. Mungkin ada pertemuan staf sesekali dan tidak direncanakan. Ada proses informal

untuk menginformasikan staf tentang keputusan dan hasil penting. Kadang-kadang, keputusan dan hasil penting didiskusikan dan beberapa staf merasa mendapat informasi tentangnya.

- e. Tidak ada ruang kantor Permubha. Peralatan dipinjam dari orang lain atau diimprovisasi. Tidak ada sistem persediaan.

Permubha secara umum telah melewati kapasitas Struktur dan sistem pada tahap tumbuh, hal ini ditunjukkan dengan sejarah Permubha yang mengalami pasang surut, namun sampai dengan proses kajian ini kondisi yang ada telah memenuhi indikator pengukuran pada tahap tumbuh.

3. Tahap Ketiga – Berkembang

Deskripsi kapasitas struktur dan sistem pada tahap berkembang ditandai dengan indikator pada setiap parameter sebagai berikut:

- a. Ada organogram Permubha tertulis, tetapi jalur pelaporan dan hubungan pengawasan tidak sepenuhnya jelas. Otoritas dan akuntabilitas dipusatkan pada beberapa individu. Organogram Permubha tidak banyak diketahui oleh staf di berbagai tingkatan.
- b. Permubha memiliki beberapa kebijakan dasar dan manual prosedur yang mencakup beberapa bidang operasional yang relevan (program, keuangan, pengadaan, sumber daya manusia dan TI). Staf belum dilatih tentang kebijakan dan prosedur organisasi dan sering terjadi penyimpangan dalam praktiknya. Kebijakan dan prosedur organisasi agak ketinggalan jaman.
- c. Ada proses konsultasi formal dan/atau struktur terdokumentasi untuk pendelegasian keputusan penting, yang mencakup beberapa staf. Namun, proses ini tidak sepenuhnya

kelas dan hanya diikuti beberapa waktu. Staf dikonsultasikan mengenai beberapa keputusan yang mempengaruhi mereka. Permubha memiliki sistem komunikasi internal dasar. Interaksi antara individu, unit dan program bergantung pada hubungan pribadi. Rapat staf direncanakan, tetapi sering ditunda atau dibatalkan. Alat komunikasi internal lainnya mungkin ada, tetapi jarang digunakan.

- d. Ada proses formal untuk menginformasikan staf dan donor tentang keputusan dan hasil penting, tetapi tidak diikuti secara rutin. Pemimpin terkadang melaporkan keputusan dan hasil melalui forum yang sesuai dan terbuka (forum komunitas, pertemuan pemangku kepentingan, Rapat Desa, dan lain-lain). Penerima manfaat tidak diberitahu tentang keputusan dan hasil penting.
- e. Ada ruang dan peralatan kantor yang memenuhi beberapa kebutuhan tetapi menyisakan celah besar. Ada sistem persediaan dasar di tempat.

Perjalanan Permubha sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan aktivitas kapasitas struktur dan sistem yang berkembang, dengan berbagai intervensi yang dilakukan. Bahkan dalam tahap ini memiliki interaksi inklusi sosial dan ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya beberapa aktivitas yang melibatkan masyarakat secara sosial misalnya pertemuan rutin dan adanya kegiatan ekonomi meskipun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan kondisi informal. Hal ini menandakan bahwa Permubha telah mencapai tahapan berkembang.

4. Tahap Keempat – Maju

Parameter kapasitas struktur dan sistem pada tahap maju diindikasikan dengan kondisi jika:

- a. Ada organogram dengan garis pelaporan dan hubungan pengawasan yang jelas. Organogram Permubha tersebut belum banyak diketahui oleh semua staf di berbagai tingkatan. Organogram Permubha tersebut sejalan dengan rencana strategis. Organogram Permubha tidak ditinjau dan diperbarui secara berkala atau digunakan secara konsisten.
- b. Permubha memiliki manual kebijakan dan prosedur organisasi yang mencakup sebagian besar area operasional yang relevan (program, keuangan, pengadaan, sumber daya manusia, dan TI). Sebagian besar staf telah dilatih tentang kebijakan dan prosedur dan mereka biasanya dipatuhi dengan beberapa penyimpangan kecil. Beberapa kebijakan dan prosedur organisasi Permubha ditinjau dalam dua tahun terakhir.
- c. Ada proses konsultasi formal dan/atau struktur formal untuk pendelegasian keputusan penting yang mencakup semua staf. Proses ini jelas dan diikuti sebagian besar waktu. Staf dikonsultasikan mengenai sebagian besar masalah yang mempengaruhi mereka dan beberapa upaya dilakukan untuk berkonsultasi dengan penerima manfaat.
- d. Permubha memiliki sistem komunikasi internal yang fungsional. Individu, unit dan program berfungsi secara efektif bersama-sama dan berbagi informasi dan sumber daya. Ada rapat staf reguler dengan agenda dan risalah tertulis. Alat komunikasi internal lainnya ada dan digunakan. Ada proses formal untuk menginformasikan staf, donor dan penerima manfaat tentang keputusan dan hasil penting dan proses ini biasanya diikuti. Pemimpin melaporkan keputusan dan hasil secara teratur melalui forum terbuka yang sesuai (forum komunitas, pertemuan pemangku kepentingan, rapat desa, dan lain-lain).

- e. Ada ruang kantor, peralatan, dan penyimpanan yang memadai, tetapi dengan beberapa celah. Tidak ada sumber daya yang cukup untuk secara serius mempertimbangkan penggantian, peningkatan, atau pemeliharaan. Sistem inventaris ada tetapi belum diperbarui dalam satu tahun terakhir.

Dari deskripsi tersebut, Permubha telah memenuhi sebagian besar kondisi yang memenuhi tahap maju. Hal ini ditunjukkan secara umum dengan adanya proses akreditasi yang dilakukan secara rutin oleh Perpustakaan Daerah. Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan menjadi Pembina terhadap Permubha. Proses pembinaan ditunjukkan dengan penilaian akreditasi Permubha, yang menunjukkan manajemen Permubha secara teknis. Dalam penilaian akreditasi tersebut dibekali dengan enam aspek yang harus dipenuhi, meliputi Aspek Koleksi, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Pelayanan Perpustakaan, Aspek Tenaga Perpustakaan, Aspek Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, Aspek Penguatan Kinerja. Hasil akreditasi menunjukkan Permubha telah memenuhi aspek yang ada. Namun pada tahap ini dalam konteks inklusi sosial meskipun telah terdapat pemahaman dan kesadaran masyarakat belum secara formal memiliki inklusi ekonomi, yang ditandai dengan kondisi sumber pendapatan Permubha masih ditopang melalui anggaran desa utamanya untuk menopang pembiayaan rutin Permubha.

5. Tahap Kelima – Mandiri

Pada tahap mandiri, kapasitas struktur dan sistem ditandai dengan kondisi pada setiap parameter sebagai berikut:

- a. Ada organogram Permubha dengan unit yang jelas, jalur pelaporan dan hubungan pengawasan. Organogram Permubha diketahui secara luas oleh semua staf di semua tingkatan. Organogram Permubha mencerminkan rencana

- strategis saat ini. Organogram Permubha ditinjau dan diperbarui secara berkala dan digunakan secara konsisten.
- b. Permubha memiliki pedoman kebijakan dan prosedur organisasi yang mencakup semua bidang operasional yang relevan (program, keuangan, pengadaan, sumber daya manusia dan TI). Semua staf telah dilatih tentang kebijakan dan prosedur dan selalu dipatuhi. Kebijakan dan prosedur ditinjau dan diperbarui setiap tahun.
 - c. Ada proses konsultasi formal dan/atau struktur formal untuk pendelegasian keputusan penting yang melibatkan staf dan penerima manfaat. Prosesnya jelas, diketahui secara luas dan tindakan korektif diambil jika tidak diikuti. Staf dikonsultasikan mengenai isu-isu yang mempengaruhi mereka dan upaya dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat, termasuk perempuan, anak-anak dan kelompok rentan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Permubha memiliki sistem komunikasi internal yang baik. Individu, unit dan program berfungsi dengan mulus dan komunikasi ditentukan oleh kebutuhan organisasi daripada hubungan pribadi atau politik. Ada jadwal rapat staf reguler, agenda dan notulen diedarkan dan item tindakan ditindaklanjuti. Berbagai alat komunikasi internal lainnya ada dan digunakan secara teratur.
 - d. Ada proses formal untuk menginformasikan staf, donor, penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya tentang keputusan dan hasil penting dan proses ini selalu diikuti. Tindakan korektif diambil jika proses tidak diikuti. Pemimpin melaporkan keputusan dan hasil secara teratur melalui forum terbuka yang sesuai (forum komunitas, pertemuan pemangku kepentingan, Rapat Desa, dan lain-lain) dan upaya dilakukan untuk memastikan komunikasi

sesuai dengan audiens. Ada tingkat akuntabilitas ke atas, ke bawah, ke samping, internal dan eksternal yang tinggi.

- e. Permubha memiliki kantor dan peralatan yang memadai dan rencana yang memadai untuk pemeliharaan dan penggantian. Sistem inventaris ada, diperbarui secara berkala dan telah diaudit.

Kondisi tahap kelima – mandiri menunjukkan bahwa Permubha dapat menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kapasitas stuktur dan sistem tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, namun memiliki dampak inklusi sosial ekonomi utamanya terhadap masyarakat desa Ngablak.

C. Kesimpulan

Temuan kajian menunjukkan bahwa Perpustakaan Muda Bhakti mampu mendorong inklusi sosial ekonomi setelah mengkomparasikan kondisi yang ada dengan kapasitas stuktur dan sistem yang terbagi dalam enam parameter yang telah mencapai tahap berkembang menuju maju. Bentuk pengukuran stuktur dan sistem dalam kajian ini dapat menjadi literasi ilmiah dan kebijakan terhadap layanan masyarakat. Perpustakaan Muda Bhakti telah dikenal luas di masyarakat dan dipandang sebagai kehadiran yang konstruktif dalam memberdayakan inklusi sosial ekonomi dengan respon dianggap sangat terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, adanya akuntabilitas kepada masyarakat dan penerima manfaat dalam cakupan inklusi sosial ekonomi. Anggota masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan secara aktif dan konstruktif terlibat dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan Perpustakaan Muda Bhakti misalnya keterlibatan sebagai pengurus dan proses penggalangan dana.

Upaya yang dilakukan Perpustakaan Muda Bhakti selama ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk meningkatkan budaya literasi dalam inklusi sosial ekonomi dengan mengadopsi kapasitas struktur dan sistem yang selama ini telah tertata pada tahap berkembang menuju maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, H. S. "Peran Pustakawan dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Melalui Program Proliterasiku." *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*. ipi.web.id, 2018. <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/64>.
- Adriani, Diana, dan I Gst. Bgs. Wiksuana. "Inklusi Keuangan dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan Umkm dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 12 (2018): 6420. doi:10.24843/ejmunud.2018.v07.i12.p02.
- Agustina, S. "Perpustakaan Sebagai Wahana Terapi yang Ramah Disabilitas: Implementasi Biblioterapi di Perpustakaan Lingkungan pendidikan." *EduLib*, 2014. <https://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/article/view/1137>.
- Catts, Ralph, dan Jesus Lau. "Towards Information Literacy Indicators: Conceptual framework paper." *Information for All Programme (IFAP), UNESCO*, 2008.
- Devega, Evita. "TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet di Medsos." *kominfo.go.id*, 2021. https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media.
- Edmonds, W, Alex., dan Thomas D. Kennedy. *An Applied Guide to Research Designs Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Second Edition* · W. Alex Edmonds Thomas D. Kennedy Nova Southeastern University. • 1): ISAGE Los Angeles I London I New Delhi Singapore I. Sage Publications. Los Angeles: SAGE, 2017.
- Fitriana, Wika. *Promosi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar*. repo.iain-tulungagung.ac.id, 2021. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/19471>.

- Gutama, Prima Putra Budi, dan Bambang Widiyahseno. "Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa." *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 70–80. doi:10.33366/rfr.v10i1.1834.
- Haryanto, H. "Penerapan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perguruan Tinggi Melalui Literasi Kewirausahaan Dan Entrepreneur Corner." *Jurnal IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia)*. ipi.web.id, 2020. <http://ipi.web.id/jurnal/index.php/jurnalipi/article/view/49>.
- Inten, D N. "Peran keluarga dalam menanamkan literasi dini pada anak." *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2017. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/golden_age/article/view/2689.
- Jannah, Yana Raudhatul, dan David Kaluge. "Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Inklusi Keuangan Negara Asia Tahun 2010-2015." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 1–13. doi:10.21107/dinar.v6i1.2532.
- Kemendikbud. "KNIU Gelar Sosialisasi UNESCO GNLC dan UNESCO WBCC." <https://gln.kemdikbud.go.id/>, 2021. <https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/kniu-gelar-sosialisasi-unesco-gnlc-dan-unesco-wbcc/>.
- Khairunisa, K, dan W Dastina. "Strategi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Provinsi Jambi dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Mewujudkan Masyarakat" ... *Ilmu Perpustakaan ...*, 2020. http://baitululum.fah.uinjambi.ac.id/index.php/b_ulum/article/view/65.
- Mahdi, Reza dan Andi Asari. "Pemberdayaan Masyarakat oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Magelang dalam Mewujudkan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Jurnal PKS* 19, no. 3 (2020): 255–63.
- Nasution, Lia Nazliana, dan Desi Astut. "Kajian Inklusi Sosial dan Keuangan serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *JURNAL Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2018): 38–43.

- Ningrum, D F. "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMA N 1 Jetis Bantul." *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 2020. <https://journal.uui.ac.id/unilib/article/view/14279>.
- Ningrum, Dian Fitri. "Kegiatan Inklusi Sosial di Perpustakaan Ganesha SMA N 1 Jetis Bantul." *UNILIB: Jurnal Perpustakaan* 10, no. 2 (2019): 123–31. doi:10.20885/unilib.vol10.iss2.art9.
- NS, Sutarno. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2006.
- Prasetyawan, Yanuar Yoga, dan Patut Suharso. "Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Perpustakaan Desa." *Acarya Pustaka* 1, no. 1 (2015): 31–40.
- Rachman, R A, dan D Sugiana. "Strategi sukses transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk masyarakat sejahtera (studi pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar" *Seminar Nasional MACOM* researchgate.net, 2019. https://www.researchgate.net/profile/Rani_Rachman3/publication/338983808_Strategi_Sukses_Transformasi_Perpustakaan_Desa_Berbasis_Inklusi_Sosial_untuk_Masyarakat_Sejahtera_Studi_Pada_Perpustakaan_Desa_Gampingan_Gemar_Membaca_Malang/links/5e365dad458515072d.
- Raharja, Surya Putra, dan Nursalim. "Pemberdayaan Masyarakat Suku Kokoda Dalam Membangun Rumah Baca Berbasis Inklusi Sosial." *Abdimasa* 1, no. 1 (2018): 15–19.
- Rahmah, Elva. *Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Siwi, C P, dan L Ruhaena. *Proses Stimulasi Literasi Anak Prasekolah Oleh Guru*. eprints.ums.ac.id, 2017. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/52646>.
- Sri Septina, Herawati, dan Abdul Karim Halim. "Pembuatan Taman Bacaan Masyarakat Sebagai Sarana Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid 19 di Perumahan Bukit Mekar Wangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor." *PKM-P*, 2020. doi:10.32832/pkm-p.v4i2.743.

- Utami, D, dan W D Prasetyo. "Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat." ... *Informasi Antar Perpustakaan*, 2019. <https://ejournal.perpusnas.go.id/vp/article/view/74>.
- Warsilah, Henny. "Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 17, no. 2 (2015): 207–32.
- Widodo, Ageng -. "Kebijakan Pembangunan Desa Inklusif: Analisis Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan Sidorejo, Kulonprogo D.I Yogyakarta." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2020): 40. doi:10.24235/empower.v5i2.7157.
- Woro Titi Haryanti. "Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 2, no. 2 (2019). doi:10.32734/lwsa.v2i2.728.

